



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

"EVALUASI RENSTRA 2015-2019 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN"

Disampaikan Oleh :

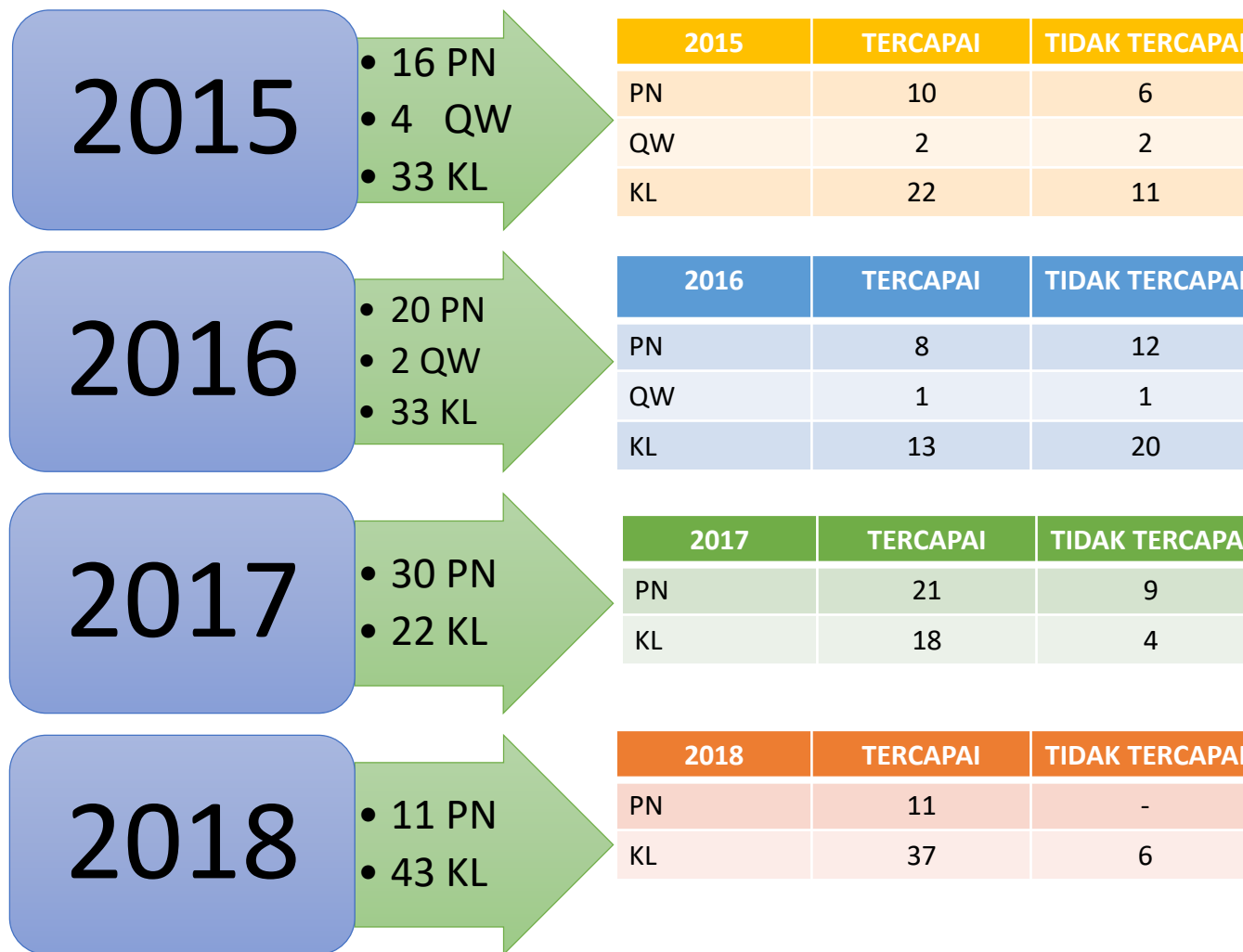
TENGKU SYAHDANA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN



@ditjenbinaadwil

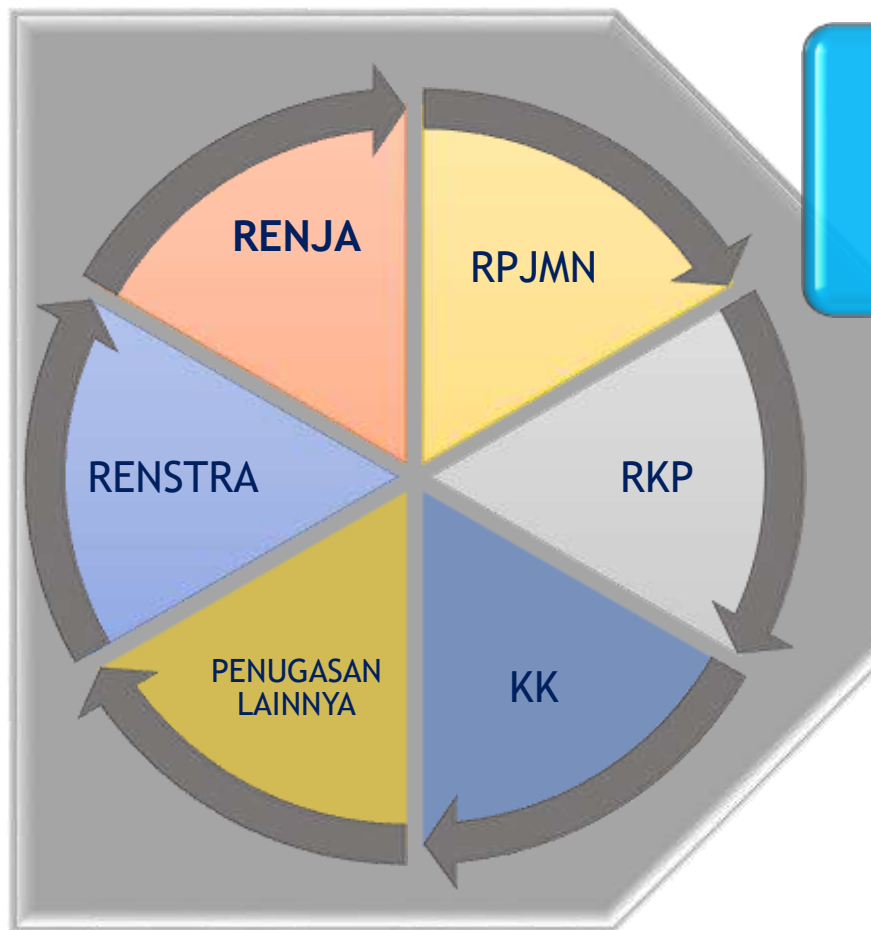


DITJEN
BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN





KESESUAIAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DITJEN BINA ADWIL 2015-2019



<div>Renstra 2015-2019 ↔ Renja</div>			
2015	Renstra	53 Indikator	Pengurangan Indikator - Penambahan/Penajaman Indikator -
	Renja	53 Indikator	
2016	Renstra	55 Indikator	Pengurangan Indikator 1 Penambahan/Penajaman Indikator -
	Renja	54 Indikator	
2017	Renstra	55 Indikator	Pengurangan Indikator 3 Penambahan/Penajaman Indikator 16
	Renja	52 Indikator	
2018	Renstra	55 Indikator	Pengurangan Indikator 1 Penambahan/Penajaman Indikator 13
	Renja	54 Indikator	
2019	Renstra	55 Indikator	Pengurangan Indikator 7 Penambahan/Penajaman Indikator -
	Renja	48 Indikator	



CAPAIAN RENSTRA

IKU DAN IKP DITJEN BINA ADWIL 2015-2019

No	Indikator Kinerja (IKU/IKP)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP)														
1	Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKU/IKP)	50% (berkinerja baik)	55% (berkinerja baik) akumulasi	60% (berkinerja baik) akumulasi	65% (berkinerja baik) akumulasi	70% (berkinerja baik) akumulasi	53,82% (berkinerja baik)	55% (berkinerja baik)	60% (berkinerja baik)	65,21% (berkinerja baik)	107.64	100	100	100.3
2	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (IKU/IKP)	34 Prov	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	34 Prov	28 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	100	54.90	100	100
3	Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah (IKP)	34% (175 Kab/Kota)	41% (211 Kab/Kota) akumulasi	60% (308 Kab/Kota) akumulasi	79% (406 Kab/Kota) akumulasi	90% (463 Kab/Kota) akumulasi	28,99% (149 Kab/Kota)	30,54% (157 Kab/Kota)	46,30% (238 Kab/Kota)	64,78% (333 Kab/Kota)	85.26	74.49	77.27	82
4	Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah (IKP)	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	55 Segmen	80 Segmen	85 Segmen	100	110	160	170
5	Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat (IKP)	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	3 Kesepakatan	5 Kesepakatan	4 Kesepakatan	5 Kesepakatan	60	100	80	100
6	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) (IKU/IKP)	20% (103 Kab/Kota)	30% (154 Kab/Kota) akumulasi	40% (206 Kab/Kota) akumulasi	50% (257 Kab/Kota) akumulasi	60% (308 Kab/Kota) akumulasi	20% (103 Kab/Kota)	30% (154 Kab/Kota)	40% (206 Kab/Kota)	50% (257 Kab/Kota)	100	100	100	100
7	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) (IKU/IKP)	10% (51 Kab/Kota)	20% (103 Kab/Kota) akumulasi	30% (154 Kab/Kota) akumulasi	40% (206 Kab/Kota) akumulasi	50% (257 Kab/Kota) akumulasi	10% (51 Kab/Kota)	19,65% (103 Kab/Kota)	30% (155 Kab/Kota)	41,25% (212 Kab/Kota)	100	100	100	102



CAPAIAN RENSTRA 2015-2018

DIT. DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kabupaten/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (AP)	80 Kab/Kota di 6 Prov	80 Kab/Kota di 6 Prov	80 Kab/Kota di 6 Provi 50 Kab/Kota (target Renja)	80 Kab/Kota di 6 Prov 15 Kab/Kota (target Renja)	60 Kab/Kota di 6 Prov	38 Kab/Kota di 11 Prov	35 Kab/Kota	46 Kab/Kota	91 Kab/Kota	47.5	43.75	92	113.75
2	Jumlah rumusan kebijakan bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan	7 Rumusan Kebijakan	5 Rumusan Kebijakan 10 Rumusan Kebijakan (target Renja)	5 Rumusan Kebijakan 6 Rumusan Kebijakan (target Renja)	5 Rumusan Kebijakan 7 Rumusan Kebijakan (target Renja)	5 Rumusan Kebijakan	4 Ranc. PP dan 3 Ranc. Permendagri	4 Ranc PP 3 Ranc Permen	4 RPP, 1 Ranc. Permen dan 1 Draft Ranc. Permen	7 Draft Permendagri	50	57.14	94.45	34.29
3	Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan	50%	60% akumulasi	75% akumulasi	85% akumulasi	95% akumulasi	45%	55%	-	-	90	91.67	-	-
4	Jumlah Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi (AP)	33 Prov	34 Prov	34 Prov 33 Prov (target Renja)	34 Prov	34 Prov	33 Prov	31 Prov	33 Prov	32 Prov	100	91.18	100	94.12
5	Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan (AP)	14 Daerah	14 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	14 Daerah	14 Daerah	-	-	100	100	-	-
6	Jumlah Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang bersifat wajib (AP)	-	8 Provinsi	9 Provinsi	9 Provinsi 8 Daerah (Target Renja)	8 Provinsi	-	8 Provinsi	-	8 Daerah	-	100	-	100

LANJUTAN....

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
7	Jumlah jenis dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang benar	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP	100 DK/TP Inventarisasi	100 DK/TP	-	100	70	100	-
8	Jumlah kumulatif Kecamatan yang menyelenggara kan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan dan pemerintahan umum	200 Kec	275 Kec akumulasi	350 Kec akumulasi	425 Kec akumulasi	500 Kec akumulasi	200 Kec	-	-	-	100	-	-	-
9	Jumlah daerah pilot project operasionalisasi pelayanan umum melalui PTSP (QW)	10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jateng, Sumut, Sulsel, Kaltim, NTT)	10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jatim, Sumbar, Sultra, Kalteng, NTB)	10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jabar, NAD, Bnaten, Jambi, Sumsel, Kalbar, Bali)	10 Kab/Kota pada 5 Prov (Bnaten, Jambi, Sumsel, Sulut, Kepri, Gorontalo)	10 Kab/Kota pada 5 Prov (Kalsel, Yoygya, Sulut, Kepri, Gorontalo)	10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jateng, Sumut, Sulsel, Kaltim, NTT)	10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jatim, Sumbar, Sultra, Kalteng, NTB)	-	-	100	100	-	-
10	Tersusun dan tersosialisasikan nya Instruksi Presiden untuk penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik (QW)	1 Inpres dan Sosialisasi di 3 Regional	-	-	-	-	Draft Inpres	-	-	-	70	-	-	-
11	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan) (PL)	34 Prov	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	34 Prov	28 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	100	54.90	100	100
12	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan, Infrastruktur Ekonomi, dan Daya Saing Perekonomian Daerah (Khususnya Fasilitasi PTSP) (AP)	-	10 Prov/ 120 Kab/Kota	8 Prov/ 120 Kab/Kota	6 Prov/ 120 Kab/Kota	98 Kab/Kota	-	13 Provinsi/ 35 Kab/Kota	-	-	-	36.92	-	-
13	Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang melimpahkan kewenangan perijinan dan non perijinan melalui PATEN (AP) <i>Indikator Baru Tahun 2017</i>	-	-	20 Kab/Kota	-	-	-	20 Kab/Kota	-	-	-	-	-	100

LANJUTAN....

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
14	Jumlah daerah yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur, dan manajemen pelayanan melalui PATEN (AP) <i>Indikator Baru Tahun 2017</i>	-	-	10 Prov	-	-	-	-	10 Prov	-	-	-	100	-
15	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya <i>Indikator Baru Tahun 2018</i>	-	-	-	100%	100	-	-	-	100%	-	-	-	100
16	Jumlah daerah/kota yang difasilitasi dalam operasionalisasi kelembagaan (peningkatan kapasitas) sekretariat kerjasama antar daerah <i>Indikator Baru Tahun 2017</i>	-	-	8 Daerah	-	-	-	-	8 Daerah	-	-	-	100	-
17	Jumlah daerah yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan <i>Indikator Baru Tahun 2018</i>	-	-	-	30 Daerah		-	-	-	30 Daerah	-	-	-	100
18	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan Kelurahan <i>Indikator Baru Tahun 2018</i>	-	-	-	20 Daerah		-	-	-	20 Daerah	-	-	-	100
19	Inisiasi kesepakatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan industri/swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi (AP) <i>Indikator Baru Tahun 2018</i>	-	-	-	3 Kawasan		-	-	-	3 Kawasan	-	-	-	100
20	Pembuatan sistem e-monev PTSP (AP) <i>Indikator Baru Tahun 2018</i>	-	-	-	1 Sistem		-	-	-	1 Sistem	-	-	-	100
21	Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang dibina dalam percepatan penerapan menuju PTSP yang Prima (AP) <i>Indikator Baru Tahun 2017</i>	-	-	40 Kab	-	-	-	-	39 Kab	-	-	-	97.50	-
22	Jumlah daerah yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP (AP) <i>Indikator Baru Tahun 2017</i>	-	-	10 Prov	-	-	-	-	10 Prov	-	-	-	100	-



CAPAIAN RENSTRA 2015-2018

DIT. KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar	5 Rumusan Kebijakan	5 Rumusan Kebijakan	5 Rumusan Kebijakan	4 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan (target Renja)	4 Rumusan Kebijakan	2 Ranc RPP,1 Ranc Permen dan 1 SE	2 Ranc PP dan 2 Ranc Permendagri	5 Draft Rumusan Kebijakan	2 Rumusan	30	38.75	42	100
2	Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar	40%	50% akumulasi	60% akumulasi	75% akumulasi	85% akumulasi	36%	45%	-	-	90	90	-	-
3	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	100
4	Jumlah daerah yang difasilitasi penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah dalam pengelolaan bidang kawasan khusus, pertanahan dan batas negara serta pulau-pulau Kecil terluar (AP)	10 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	10 Daerah	15 Daerah	15 Daerah	-	100	100	100	-
5	Jumlah kawasan khusus yang dikelola dan dikembangkan (AP)	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	3 Kawasan	5 Kawasan	-	-	60	100	-	-
6	Persentase pendataan dan pemetaan perijinan pemanfaatan kawasan dan pertanahan	50%	55% akumulasi	60% akumulasi	65% akumulasi	70% akumulasi	50%	55%	-	-	100	100	-	-
7	Jumlah daerah yang diasistensi dan mediasi dalam penyelesaian masalah pertanahan dan pemanfaatan kawasan	-	-	15 Daerah	-		-	-	17 Daerah	-	-	-	113	-
8	Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) (AP)	6 Prov	6 Prov	6 Prov	6 Prov	6 Prov	5 Prov	6 Prov	6 Prov	-	83.33	100	100	-
9	Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan (AP)	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	3 Kesepakatan	5 Kesepakatan	4 Kesepakatan	5 Kesepakatan	60	100	80	100

LANJUTAN....

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
10	Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pelayanan pemerintahan (AP)	21 Daerah	40 Unit Sarpras	40 Unit Sarpras	40 Unit Sarpras	40 Unit Sarpras	20 Daerah	16 Unit Sarpras	12 Unit Sarpras	12 Unit Sarpras	95.24	76.19	100	35
11	Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan (AP)	-	21 Unit (target Renja) 100 Kab/Kota	12 Unit Sarpras (target Renja) 100 Kab/Kota	12 Unit Sarpras (target Renja) 100 Kab/Kota	107 Kab/Kota	-	98 Kab/Kota	90 Kab/Kota	-	-	98	90	-
12	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama (AP)	2 Kawasan Perkotaan Metropolitan	5 Kawasan Perkotaan Metropolitan	7 Kawasan Perkotaan Metropolitan	10 Kawasan Perkotaan Metropolitan	12 Kawasan Perkotaan Metropolitan	2 Kawasan Perkotaan Metropolitan	5 Kawasan Perkotaan Metropolitan	7 Kawasan Perkotaan Metropolitan	-	100	100	100	-
13	Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP (QW)	-	8 Kota Sedang, 5 Kota Baru Publik	8 Kota Sedang, 5 Kota Baru Publik	8 Kota Sedang, 5 Kota Baru Publik	8 Kota Sedang, 5 Kota Baru Publik	-	8 Kota Sedang, 3 Kota Baru Publik	8 Kota Sedang, 5 Kota Baru Publik	-	-	84.62	100	-
14	Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang terpadu skala 1:1000 (AP)	-	5 Kawasan Perkotaan Metropolitan, 5 Kota Sedang	7 Kawasan Perkotaan Metropolitan, 10 Kota Sedang	10 Kawasan Perkotaan Metropolitan, 15 Kota Sedang	12 Kawasan Perkotaan Metropolitan, 20 Kota Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi Perkotaan (AP)	2 kawasan perkotaan metropolitan, 3 kota sedang	5 kawasan perkotaan metropolitan, 5 kota sedang	7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 kota sedang	10 kawasan perkotaan metropolitan, 15 kota sedang	12 kawasan perkotaan metropolitan, 20 kota sedang	2 Kawasan Perkotaan Metropolitan, 3 Kota Sedang	3 Kawasan Perkotaan Metropolitan, 5 Kota Sedang	7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 kota sedang	-	100	80	100	-
16	Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan (AP)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	50	-	100	-
17	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam kerjasama pembangunan antar kota dan antar kota/kab baik dalam negeri dan luar negeri (sister city) (AP)	10 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota	16 Kab/Kota	18 Kab/Kota	6 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-	60	100	100	-
18	Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kawasan Indikator Baru Tahun 2017	-	-	15 daerah	15 Daerah		-	-	15 daerah	15 Daerah	-	-	100	100
19	Jumlah pertemuan antar K/L dalam penyiapan materi dan instrumen perundingan perbatasan negara (AP) Indikator Baru Tahun 2017	-	-	10 Pertemuan	-	-	-	-	10 Pertemuan	-	-	-	100	-
20	Jumlah keterlibatan K/L dalam berkontribusi dalam penyelesaian/penanganan permasalahan perundingan perbatasan negara (AP) Indikator Baru Tahun 2017	-	-	10 KL	10 KL	-	-	-	10 KL	17 KL	-	-	100	100
21	Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani Indikator Baru Tahun 2018	-	-	-	20 Daerah		-	-	-	20 Daerah	-	-	-	100
22	Jumlah Perkotaan yang diperkuat kelembagaan dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan perkotaan Indikator Baru Tahun 2018	-	-	-	30 Kota	-	-	-	-	30 Kota	-	-	-	100



CAPAIAN RENSTRA 2015-2018

DIT. POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM	7 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan 5 Rumusan Kebijakan (target renja)	6 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan (target Renja)	6 Rumusan Kebijakan 12 Rumusan Kebijakan (target Renja)	6 Rumusan Kebijakan	1 Ranc PP, 1 Ranc Perpres, 3 Ranc Permendagri, 2 SKB	1 Ranc PP dan 4 Ranc Permen	1 RPP dan 1 Pedoman	12 Draft Rumusan Kebijakan	75	57	83	58.33
2	Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM	50%	60% akumulasi	75% akumulasi	85% akumulasi	95% akumulasi	45%	55%	-	-	90	91.67	-	-
3	Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	54 Kab/Kota	25 Kab/Kota	-	-	108	50	-	-
4	Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparat Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar	2.171 Orang	2.271 Orang 1.534 (target Renja)	2.371 Orang	2.471 Orang 700 Orang (target Renja)	2.571 Orang	2.199 Orang	1.190 Orang	2.204 Orang	924 Orang	101	77.57	93	100
5	Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	8 Daerah	8 Daerah	8 Daerah	8 Daerah	8 Daerah	8 Daerah	8 Daerah	-	-	100	100	-	-
6	Persentase daerah yang telah memfasilitasi SP (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP	80%	85% akumulasi	90% akumulasi	95% akumulasi	100% akumulasi	50%	61.76%	90%	100%	62.50	72.66	100	100
7	Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah (QW)	1 Buku Kode Etik Indonesia Ramah, Sosialisasi via media cetak dan eelektronik serta sosialisasi di 3 regional	-	-	-	-	1 Buku Kode Etik Indonesia Ramah, Sosialisasi via media cetak dan eelektronik serta sosialisasi di 3 regional	-	-	-	100	-	-	-
8	Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW)	1 Pedoman, sosialisasi via media cetak dan eelektronik, serta pelibatan pemerintah, pengusaha dan LSM	-	-	-	-	Draft Pedoman	-	-	-	50	-	-	-

LANJUTAN....

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
9	Prosentasi fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa	50% (17 Prov) akumulasi	65% (22 Prov) akumulasi	80% (17 Prov) akumulasi	85% (27 Prov) akumulasi	100% (34 Prov) akumulasi	50%	-	-	-	100	38.46	-	-
10	Persentase kesiapsiagaan satgas entry/transit/ daerah asal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
11	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP serta Linmas	29 Daerah	17 Daerah	-	-		28 Daerah	16 Daerah	-	-	96.55	94.12	-	-
12	Jumlah Kelembagaan, Aparatur Satpol PP/PPNS/Satlinmas Kabupaten/Kota Yang Dibina Dalam Meningkatkan Citra Positif, Kedisiplinan Dan Menerapkan Kode Etik Dalam Penegakan Perda/Perkada Indikator Baru Tahun 2017	-	-	5 Provinsi	-	-	-	-	5 Provinsi	-	-	-	100	-
13	Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah (AP) Indikator Baru Tahun 2017	-	-	34 Provinsi	-	-	-	-	30 Provinsi	-	-	-	88.24	-
14	Penyusunan Inpres Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (AP) Indikator Baru Tahun 2017	-	-	1 Inpres	-	-	-	-	1 Inmendagri	-	-	-	100	-
15	Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum (AP) Indikator Baru Tahun 2017	-	-	40% (206 Kab/Kota)	50% (257 Kab/Kota)	-	-	-	40% (206 Kab/Kota)	50% (257 Kab/Kota)	-	-	100	100
16	Prosentase Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam aktivitas Internasional Civil Defence Organization, konvensi internasional dan penerapan HAM Indikator Baru Tahun 2017	-	-	100%	-	-	-	-	80%	-	-	-	80	-
17	Persentase pelayananan administrasi dan tugas teknis lainnya Indikator Baru Tahun 2018	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	100
18	Jumlah daerah yang telah menerapkan Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi Aparatur Polisi Pamong Praja, PPNS, dan SATLINMAS Indikator Baru Tahun 2018	-	-	-	700 orang	-	-	-	-	700 Orang	-	-	-	100



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN RENSTRA 2015-2018
DIT. MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar	5 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan (target Renja)	2 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan (target Renja)	2 Rumusan Kebijakan 3 Rumusan Kebijakan (target Renja)	2 Rumusan Kebijakan	1 Draf Permen, 1 Pedoman, 3 Ranc Pedoman	1 Ranc Perpres, 1 Ranc Permen	3 Draft Rumusan Kebijakan	3 Permendagri	50	20	42.87	100
2	Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar	50%	60% akumulasi	75% akumulasi	85% akumulasi	95% akumulasi	45%	55%	-	-	90	91.67	-	-
3	Jumlah aparaturnya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (AP)	20 Daerah (50Orang/ Daerah)	30 Daerah (50 Orang/ Daerah) 10 Daerah (50 Orang/ Daerah) (target Renja)	30 Daerah (50 Orang/ Daerah) 1000 Orang (target Renja)	30 Daerah (50 Orang/ Daerah) 310 Orang (target Renja)	30 Daerah (50 Orang/ Daerah)	1690 Orang	634 orang	1.145 Orang	320 Orang	169	63.40	114	103
4	Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	30 Sarpras 21 Sarpras (target Renja)	30 Sarpras 20 Sarpras (target Renja)	30 Sarpras 20 Sarpras (target Renja)	30 Sarpras 6 Unit Sarpras (target Renja)	30 Sarpras	21 Sarpras	15 Sarpras	20 Sarpras	6 Unit	100	75	100	100
5	Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	20% (103 Kab/Kota)	25% (129 Kab/Kota) akumulasi	30% (154 Kab/Kota) akumulasi	35% (180 Kab/Kota) akumulasi	40% (206 Kab/Kota) akumulasi	20% (103 Kab/Kota)	25% (129 Kab/Kota) akumulasi	30% (154 Kab/Kota) akumulasi	41,25% (212 Kab/Kota)	100%	101.96	100	102

LANJUTAN....

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
6	Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	60 Daerah	60 Daerah	60 Daerah	60 Daerah	60 Daerah	60 Daerah	-	-	-	100	-	-	-
7	Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran	50%	65% akumulasi	80% akumulasi	85% akumulasi	100% akumulasi	50%	67.00%	-	-	100	134	-	-
8	Jumlah daerah yang melaksanakan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (AP) Indikator Baru Tahun 2017	-	-	30 Daerah	34 Prov		-	-	30 Daerah	32 Prov	-	-	100	94.12
9	Jumlah daerah yang mendapatkan asistensi dalam keadaan tanggap darurat dan pasca bencana Indikator Baru Tahun 2017	-	-	30 Daerah	30 Daerah		-	-	20 Daerah	30 Daerah	-	-	67	100
10	Persentase pelayananan administrasi dan tugas teknis lainnya Indikator Baru Tahun 2018	-	-	-	100%		-	-	-	100%	-	-	-	100
11	Persentase daerah yang meningkat kualitasnya dalam memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Penanggulangan Bencana Indikator Baru Tahun 2018	-	-	-	20% (103 Kab/Kota)		-	-	-	19.64% (101 daerah)	-	-	-	98.2



CAPAAN RENSTRA 2015-2018

DIT. TOPONIMI DAN BATAS DAERAH

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumusan kebijakan bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi (AP)	32 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan 2 Permendagri (target Renja)	35 Rumusan Kebijakan	41 Permendagri	54 Permendagri	1 PP dan 76 Permendagri	1 Ranc. Permendagri	128	154.29	100	30
2	Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi	50% akumulasi	60% akumulasi	70% akumulasi	80% akumulasi	90% akumulasi	45%	55%	-	-	90	91.67	-	-
3	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya	-	-	-	100%		-	-	-	100%	-	-	-	100
4	Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan (AP)	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	55 Segmen	80 Segmen	80 Segmen	100	110	160	170
5	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupa bumi	28 Daerah	28 Daerah 30 Daerah (target Renja)	28 Daerah 23 Daerah (target Renja)	28 Daerah 30 Daerah (target Renja)	28 Daerah	27 daerah	24 Daerah	23 Daerah	30 Daerah	96.42	80	100	100
6	Persentase pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya	40% akumulasi	50% akumulaasi	60% akuimulasi	70% akuimulasi	80% akuimulasi	40%	-	60%		100	-	100	
7	Jumlah pembakuan rupabumi (pulau) (AP) <i>Indikator Baru Tahun 2017</i>	-	-	250 Pulau	200 Pulau		-	-	250 Pulau	200 Pulau	-	-	100	100
8	Jumlah unsur rupabumi warisan budaya <i>Indikator Baru Tahun 2018</i>	-	-	-	25 Unsur		-	-	-	25 Unsur	-	-	-	100
9	Jumlah aparaturnya pusat dan daerah yang ditingkatkan kompetensinya bidang toponimi dan batas daerah secara profesional <i>Indikator Baru Tahun 2018</i>	-	-	-	170 Orang		-	-	-	170 Orang	-	-	-	100



CAPAIAN RENSTRA 2015-2018
SEKRETARIAT DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

No	Indikator Kinerja (IKK)	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
3	Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan serta dokumen ketatalaksanaan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
5	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100	100	100	100
6	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
7	Persentase Pembinaan Bidang Administrasi Kewilayahan di pusat dan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
8	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
9	Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	80%	82%	84%	86%	88%	92%	-	-	-	115	-	-	-



MATRIK EVALUASI RENSTRA DITJEN BINA ADWIL 2015-2019

INDIKATOR			CAPAIAN RENSTRA DITJEN BINA ADWIL 2015-2019		REKOMENDASI				
UNIT KERJA :									
1.			Indikator berlanjut	Indikator tidak berlanjut	Indikator digabung	Indikator dihapus	Penajaman Indikator	Penambahan Target	
2			... Indikator	... Indikator	... Indikator	... Indikator	... Indikator	... Indikator	
3			Catatan :						
4									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

BAHAN MASUKAN PENATAAN INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA 2020-2024



TERIMA KASIH

INDONESIA

